

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian ini, penulis menyimpulkan pokok-pokok penting tulisan ini. Penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya dirangkaikan kembali secara ringkas dalam bab ini. selain itu, pada bab ini juga akan disampaikan saran kepada beberapa pihak yakni pemerintah, otoritas agama, masyarakat, akademisi dan penulis selanjutnya. pihak ini dijadikan sasaran karena berhubungan muatan tulisan ini.

4.1 Kesimpulan

Politisasi agama mengindikasikan adanya aneksasi antara ruang privat dan ruang publik. Aneksasi ini mengakibatkan agama masuk ke ranah politik. Tidak adanya pembatasan antara keduanya mengakibatkan dampak negatif terhadap politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia. Politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia adalah suatu ruang yang memungkinkan setiap orang untuk bertindak dan berbicara bersama di dalamnya. Bertindak dan berbicara selalu mengandaikan yang lain. Atas dasar itu, politik berhubungan dengan fakta pluralitas. Politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia mengandaikan beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah pengakuan akan pluralitas manusia, sifat tidak dapat diprediksi dari politik, dan adanya kekuasaan. Pengakuan terhadap pluralitas, secara ringkas, diandaikan karena politik yang didasari oleh tindakan dan pembicaraan selalu mengandaikan kehadiran yang lain. Selain itu, tindakan dan pembicaraan sebagai aktualisasi keunikan setiap personal melekat pula pluralitas. Sedangkan, sifat tidak dapat diprediksi dari politik berakar pada tindakan yang serentak dilakukan dalam kebebasan yang tidak dapat diduga. Kecuali itu, politik juga melahirkan kekuasaan. Kekuasaan muncul ketika orang berkumpul, bertindak, dan berbicara secara bersama dan membuat suatu kesepakatan bersama. Dalam kekuasaan tersebut, setiap orang diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam mencapai suatu kesepakatan bersama.

Dalam konteks politisasi agama, masuknya agama ke dalam politik mengakibatkan ketiga aspek tersebut menghilang. Pertama, politisasi agama menyebabkan hilangnya penghargaan akan pluralitas manusia. Politisasi agama

yang menghendaki ajaran agama tertentu sebagai landasan dalam suatu kebijakan politik, menjadikan perbedaan yang terkandung dalam ruang politik tersebut diabaikan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa menjadikan doktrin agama tertentu sebagai dasar dalam berpolitik berarti mengabaikan adanya perbedaan keyakinan dari agama lain. Alih-alih sebagai dasar politik, mereka yang berkeyakinan berbeda harus menerima apa yang menjadi seruan dari ajaran agama tertentu. Hal ini nampak dalam pemberlakuan perda syari'ah. Karena sebagai kebijakan politik pemerintah daerah, kewajiban menggunakan jilbab juga menyasar perempuan yang bukan beragama muslim. Hal ini menggambarkan lenyapnya penghargaan dan pengakuan terhadap pluralitas keyakinan dalam tubuh bangsa Indonesia.

Selain itu, politik sebagai ruang 'di-antara' manusia berkaitan langsung dengan fakta pluralitas manusia. Dalam politik, pluralitas tersebut harus ditampilkan karena dengan itulah politik sebagai ruang 'di-antara' manusia bermakna dan bereksis. Dalam kaitan dengan itu, jika ajaran agama tertentu dijadikan sebagai dasar kehidupan politik berarti politik diarahkan menurut tuntunan ajaran agama tertentu pula. Perbedaan keyakinan diabaikan karena politik akhirnya dipatokkan pada satu ajaran tertentu. Dengan demikian, politik sebagai ruang 'di-antara' manusia harus dibebaskan dari landasan suatu ajaran agama tertentu.

Kedua, politisasi agama menghilangkan sifat tidak dapat diprediksi dari politik sebagai ruang 'di-antara' manusia. Sifat tidak dapat diprediksi dari politik bersumber pada tindakan dan pembicaraan yang mendasari politik. Oleh karena tindakan dan pembicaraan sebagai bentuk aktualisasi keunikan manusia itu tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diduga, maka politik yang muncul dari tindakan dan pembicaraan juga bersifat tidak dapat diprediksi. Sifat ini juga tidak terlepas dari kebebasan yang diandaikan dalam tindakan. Tindakan yang dilakukan dalam kebebasan inilah yang membuat tindakan tersebut tidak dapat diprediksi. Dalam konteks politisasi agama, menjadikan agama sebagai dasar kehidupan politik berarti memetakan agama sesuai dengan agama tertentu. Sifat tidak dapat diprediksi dari politik menghilang karena arah politik sudah dapat diprediksi dalam ajaran agama tertentu. Dengan menjadikan ajaran agama tertentu sebagai

dasar politik, kita dapat memprediksi bahwa kebijakan politik yang dibuat akan bersifat diskriminatif dan memihak kepada agama tertentu. Arah politik sudah dapat diprediksi sesuai dengan kepentingan agama tersebut.

Ketiga, politisasi agama menghilangkan kekuasaan dalam politik. Kekuasaan dalam politik sebagai ruang 'di-antara' manusia, sebagaimana Arendt, terbentuk atas tindakan dan pembicaraan bersama untuk membuat suatu kesepakatan bersama. Aktualisasi keunikan setiap orang dalam kebersamaan memunculkan kekuasaan dalam politik. Dengan kekuasaan dimungkinkan suatu perdebatan dan argumentasi sebelum mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, karena berkaitan dengan kesepakatan bersama, maka kekuasaan juga menyangkut hasil akhir suatu konsensus yang bersifat universal. Dalam kaitan dengan itu, politisasi agama menghilangkan kekuasaan karena doktrin agama yang dijadikan sebagai dasar berpolitik menutupi ruang perdebatan. Doktrin agama tidak bisa diperdebatkan karena sifatnya absolut, sedangkan politik mengandaikan adanya perdebatan. Menjadikan ajaran agama sebagai dasar politik berarti mengubah kebenaran relatif dalam politik menjadi kebenaran mutlak versi agama. Selain itu, ajaran agama tertentu sebagai landasan kebijakan politik mengindikasikan pengabaian terhadap keberagaman keyakinan. Kebijakan politik berbasis doktrin agama bertendensi memihak agama tertentu sehingga kekuasaan yang di dalamnya memuat kesepakatan bersama menjadi hilang. Sementara itu, kekuasaan yang darinya muncul pegangan bersama mestinya melampaui suatu ajaran agama tertentu. Kekuasaan politik mengakomodasi semua pluralitas aktor di dalamnya karena kekuasaan bersifat milik semua orang. Karena itu, ketika politik menjadikan ajaran agama tertentu sebagai dasarnya, maka politik kehilangan kekuasaan. Kekuasaan juga menghilang karena ajaran agama tertentu secara implisit memaksa mereka yang beragama lain mengikutinya alih-alih kebijakan politik.

Dampak negatif dari politisasi agama terhadap politik sebagai ruang 'di-antara' manusia yang sudah penulis bahas menunjukkan bahwa agama dan politik mesti dipisahkan. Agama dan politik harus bisa membatasi cakupannya masing-masing. Pemisahan tersebut bukan dalam pengertian pemisahan secara tegas, tetapi mengenal batasan masing-masing. Dalam konteks Indonesia, agama

memang melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Namun, pengenalan batas antara agama dan politik sangat penting agar keduanya tidak saling menunggangi untuk kepentingan tertentu. Dalam pengertian ini, agama tetap diaktualisasikan, tetapi mesti memperhatikan batasannya. Agama harus tetap memperhatikan politik itu sendiri sebagai ruang ‘di-antara’ manusia dengan beberapa aspek di dalamnya. Dalam aktualisasinya, agama tetap memperhatikan pluralitas keyakinan dari orang lain, sifat tidak dapat diprediksi dari politik, dan kekuasaan yang mendasari politik. Dengan memperhatikan hal tersebut, agama dapat membatasi ekspresinya berhadapan dengan politik.

4.2 Saran

Pada bagian ini, penulis hendak memberikan saran kepada beberapa pihak, yakni pemerintah, otoritas keagamaan, masyarakat, akademisi, dan penulis selanjutnya.

4.2.1 Pemerintah

Melalui tulisan ini, penulis hendak menyarankan kepada pemerintah untuk menjadikan pendidikan politik sebagai salah satu bagian mata pelajaran dalam pendidikan formal di Indonesia. Dengan itu, pemahaman politik dapat ditanamkan sejak dini kepada rakyat Indonesia.

4.2.2 Otoritas Keagamaan

Melalui tulisan ini, penulis hendak menyarankan kepada otoritas keagamaan untuk membentuk suatu organisasi bersama lintas agama yang bersifat independen untuk mengawasi, mengontrol, dan mencegah terjadinya politisasi agama. organisasi ini juga bisa bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti para politisi yang menggunakan politisasi agama menjelang pemilihan umum dan lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi untuk mengantisipasi formalisasi agama dalam kebijakan politik.

4.2.3 Masyarakat

Penulis menyarankan kepada masyarakat umum untuk bisa mengkritisi berbagai bentuk politisasi agama yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia baik dalam bentuk formalisasi kebijakan maupun dalam pemilihan umum.

4.2.4 Akademisi

Melalui tulisan ini, penulis menyarankan kepada kaum akademisi untuk memberikan pencerahan, wawasan, dan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk politisasi agama dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal ini bisa dibuat dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi di tataran kampus atau organisasi-organisasi tertentu, misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa, untuk membahas dinamika politik Indonesia pada umumnya dan politisasi agama pada khususnya.

4.2.5 Penulis Selanjutnya

Penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk bisa mengkritisi atau menambahkan kekurangan yang mungkin lupa diperdalam dalam tulisan ini. dengan perkataan lain, penulis selanjutnya bisa memperbaiki kekurangan dari tulisan ini dengan tulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan), “simbol,” dalam <https://kbbi.web.id/simbol>.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

II. Buku-buku

Arendt, Hannah. *The Human Condition*. Edisi Ke-II. Chicago: The University of Chicago Press, 1958.

_____. *Between Past and Future*. The Viking Press. New York: The Viking Press, 1961.

_____. *On Violence*. New York: Viking Press, 1965.

_____. *The Promise of Politics*. New York: Sochken Books, 2005.

_____. *Hannah Arendt: The Last Interview and Other Conversations*. Edited by Christopher Hitcens. Brooklyn: Melville House Publishing, 2013.

Arif, Syaiful. *Islam, Pancasila, Dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2018.

Assyaukanie, Luthfi. *Ideologi Islam Dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute, 2011.

Brown, Andrew ed. *Hannah Arendt: The Last Interview and Other Conversations*. London: Melville House Publishing, 2013.

Buckler, Steve. *Hannah Arendt and Political Theory*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.

D’Entreves, Maurizio Passerin. *The Political Philosophy of Hannah Arendt*. Edisi ke-I. New York: Routledge, 1994.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Medan, Sumatera Utara: Walashri Publishing, 2020.

Hayden, Patrick, ed. *Hannah Arendt & Key Concepts*. *Hannah Arendt*. New York: Routledge, 2017.

Hobbes, Thomas. *Leviathan*. J. C. A. Gaskin (ed.). (London: Oxford University Press, 2008).

Kamil, Sukron, Chaider S. Bamualim, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Center for The Study of Religion and Culture (CSRC). *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*. Jakarta:

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2007.

Koten, Yosef Keladu. *Etika Keduniawian: Karakter Etis Pemikiran Politik Hannah Arendt*. Maumere: Ledalero, 2018.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Percaturan Islam Dan Politik*. Edited by Yanuar Arifin. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Munawar-Rachman, Budhy. "Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, Dan Kemodernan". Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society (NCMS), 2019.

Panggabean, Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal, ed. *Demokrasi dan Kekecewaan*. Vol. 16. Jakarta: Democracy Project, 2011.

Prasetyo, Eko. *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.

Raho, Bernard. *Sosiologi*. maumere: Ledalero, 2019.

—————. *Sosiologi Agama*. Maumere: Ledalero, 2019.

Ritaudin, Sidi. *Benturan Politik: Antara Idealisme dan Pragmatisme*. Sukarame Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2012.

Sugiarto, Bowo ed. *Demokrasi, Budaya Dan Penguatan Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2020.

Tjahjadi, Lili (ed.). *Agama dan Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbitan Lokal, 2011. Ummah, Rahmatul, ed. *API Akal Pikiran Rocky Kumpulan Tulisan, Artikel, Dan Wawancara*. Kedua. Lampung, 2021.

Wahid, KH. Abdurahman, ed. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Jakarta: the Wahid Institute, 2009.

III. Jurnal Ilmiah

Ahmad, La Ode Ismail. "Relasi Agama dengan Negara dalam Pemikiran Islam (Studi Atas Konteks Ke-Indonesia-An)." *Millah*, Vol. X, No. 2 (2011).

Altinordu, Ateş. "The Politicization of Religion: Political Catholicism and Political Islam in Comparative Perspective." *Politics and Society*, Vol. 38, No. 4 (2010), <https://doi.org/10.1177/0032329210381238>.

Badri, Ainul. "Pemikiran Muhammad Natsir Tentang Agama dan Negara." *Ri'ayah*, Vol. 5, No. 02 (2020).

Betz, Joseph. "An Introduction to the Thought of Hannah Arendt". *Transactions of The Charles S. Pierce Society*, Vol. 28, No. 3 (1992).

Canovan, Margaret. "Politics as Culture : Hannah Arendt and The Public Realm." *History of Political Thought*, Vol. 6, No. 3 (1985).

- Faradina Ilma Mahanani , Qisthi. “Pemikiran Ki Bagus Hadikusumo Tentang Islam Dan Negara Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953).” *Jurnal El Tarikh*, Vol. 1, No. 2 (2020).
- Fearon, James D. “What Is Identity (As We Now Use the Word)?” *Department of Political Science(Stanford University)*, 1999.
- Fikroh, Hasanul Bulqiyah dan Seviyenti. “Politisasi Agama di Pemilihan Presiden 2024 (Studi Kasus Korpus Bahasa dan Politik di Provinsi Jawa Barat, Indonesia).” *Jurnal Aksara*, Vol. 25, No. 1 (2024).
- Habermas, Jurgen. “Hannah Arendt’s Communications Concept of Power.” *Social Research*, Vol. 44, No. 1 (1977).
- Institute for Policy Analysis of Conflict. “After Ahok: The Islamist Agenda in Indonesia.” *Institute for Policy Analysis of Conflict*, No. 44 (2018).
- Jailani, Imam Amrusi. “Pergolakan Politik antara Tokoh Muslim dan Nasional dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia.” *Karsa*, Vol. 22, No. 2 (2014).
- Junaedi, Mahfudz. “Agama Dalam Masyarakat Modern: Pandangan Jürgen Habermas.” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 20, No. 1 (2020).
- Keladu, Yosef. “Ethics of Worldliness: The Ethical Character of Arendt’s Political Thought”. *Kritik*, Vol. 9, No.1, June (2015).
- _____. “Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi Untuk Konteks Indonesia”. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 14, No. 2 (2023).
- Kurniawan, Budi. “Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi.” *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.
- Malik, Abdul, and Ariyandi Batubara. “Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi Religion Commodification in Political Activities in Seberang Kota Jambi.” *Kontekstualita*, Vol. 29, No. 2 (2014).
- Marom, Ahmad Anfasul. “Syari’ah Movements in Comparasion: South Sulawesi and West Java Province Ahmad Anfasul Marom.” *Alqalam*, Vol. 28, No. 1 (2011).
- Noor, Irfan. “Identitas Agama, Ruang Publik Dan Post-Sekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 11, No. 1 (2016), <https://doi.org/10.18592/jiu.v11i1.733>.
- Pratiwi, Alya Intan, dkk. “Problematika Kewajiban Penggunaan Jilbab Bagi Siswi Di Sekolah Negeri.” *Azzahra: Scientific Journal of Social and Humanities*, Vol. 1, No. 2 (2023).
- Qodir, Zuly dan Haedar Nashir. "Keislaman, Kemanusiaan, Keindonesiaan,

dan Budaya: Studi Perbandingan Pemikiran Ahmad Syafii Maarif, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid Islamity". *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15, No. 2, (2019). <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0104.226-253>.

Rudd, Anthony. "The Political Philosophy of Hannah Arendt". *Cogito*, Vol. 8, 1994, <https://doi.org/10.5840/cogito19948318>.

Setiawan, Zudi. "Peran Tokoh Nahdlatul Ulama dalam Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia." *Spektrum*, Vol. 18, No. 2 (2021), <http://www.indonesia.go.id>.

Sukanto, Amos. "Ketegangan antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru." *Indonesian Journal of Theology*, Vol. 1, No. 1 (2013).

Sundari, Elisabeth, dkk. "Perlindungan bagi Kelompok Agama Minoritas Menghadapi Kelompok Agama Mayoritas: Studi Kasus Ahok dan Meliana." *Justitia et Pax*, Vol. 36, no. 2 (2020).

Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, and Ade Meiliyana. "Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia Serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah." *Tsaqafah*, Vol. 16, No.1 (2020).

Syafi'i, Muhammad. "Simbol Agama dan Budaya dalam Iklan Politik Pilkada Analisis Semiotika Roland Barthes." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Werang, Mans. "Hannah Arendt on Freedom and Political." *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 17, No. 1, (2017).

Wilandra, Syaidina Sapt. "Kontinuitas Pemikiran Tokoh Islam Tentang Islam Pancasila Sebagai Dasar Negara." *Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 1, (2024).

IV. Materi Kuliah

Kleden, Leo. "Hermeneutika Wilhelm Dilthey". Materi Kuliah Hermeneutika di IFTK Ledalero (2023).

V. Internet

Abdillah, Masykuri. "Membendung Politisasi Agama". *Kompas.id.*, 20 Juli 2018, Membendung Politisasi Agama - Kompas.id.

Antony, Noval Dhwinuari. "Kontroversi Takjil Politik #2019GantiPresiden." detiknews, 2018. Noval Dhwinuari Antony%0A%0ABaca artikel detiknews, %22Kontroversi Takjil Politik #2019GantiPresiden%22 selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4039286/kontroversi-takjil-politik-2019gantipresiden.%0A%0ADownload Apps Detikcom Sekarang> <https://apps.de>.

- Faizin, Muhammad. "Beda Politisasi Agama Dan Politik Agama." NU Online, 2019, <https://nu.or.id/nasional/beda-politisasi-agama-dan-politik-agama-HQpPq>.
- Indonesia, Tim CNN. "Kronologi Kericuhan Demonstrasi Anti Ahok Di Depan Istana." CNN Indonesia, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161104201401-20-170410/kronologi-kericuhan-demonstrasi-anti-ahok-di-depan-istana>.
- Putri, Budiarti Utami. "Amien Rais Akui Sebutan Umrah Politik Benar." tempo, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1097043/amien-rais-akui-sebutan-umrah-politik-benar#:~:text=TEMPO.CO%2C Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat,banyak yang menyebut demikian.%22Umrah politik itu betul>.
- Rasyid Ridho, Reni Susanti. "Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Banten." Kompas.com, 2022.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. "Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas." Kompas.com, n.d.
- Simanjuntak, Hotli. "Langgar Hukum Syariah, Warga Aceh Terima Hukum Cambuk". *tempo.co*, 26 April 2024, Langgar Hukum Syariah, Warga Aceh Terima Hukum Cambuk | tempo.co.